

UNIVERSITAS GADJAH MADA

# PENGELOLAAN STASIUN JEBRES DAN KAWASANNYA DALAM UPAYA PELESTARIAN SUMBERDAYA ARKEOLOGI

## *Management of Jebres Station and Its Surrounding in Order to Conserve The Archeology Resouces*

Sri Ediningsih<sup>1</sup>, Inajati Adrisijanti<sup>2</sup>, dan Musadad<sup>2</sup>

*Program Studi Arkeologi*

*Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

### ABSTRACT

Surakarta has many cultural heritages from the Islamic Mataram Period, especially related with the coming of the Westerns. Islamic Mataram heritage represented by Kasunanan Surakarta palace and the coming of the Westerns was represented by many colonial buildings. A site in Surakarta which preserves cultural product of those eras is Jebres railway station and its surroundings. From this cultural heritage, it can be seen interesting potential, mainly, on the varieties and function of the building, e.g.: dwelling house, worshipping, education, and transport facilities. This study intends to identify the characteristic of cultural resources in Jebres area which is vulnerable to the changes due to city development.

The research was performed by collecting archeological data which existed in Jebres railway station and its surroundings. Other data including governmental policy documents, institutional data (country and sub-district), basic and thematic maps, historical data ("babad"), and related study result. After they were collected, then field survey was performed including observing the site, recording the building's condition, taking picture, and plotting historical buildings on the basic map. Afterwards, the data was presented via photographs and distribution maps of potentials existing in that cultural area. The result of analysis showed that Jebres has significances as an identity of the historical city of Surakarta. Therefore, a management strategy is needed for an optimal preservation effort.

**Keywords:** *Jebres railway station, cultural areas, cultural resources management*

- 
1. PNS Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah.
  2. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## PENGANTAR

Pertama kali kedatangan bangsa Belanda pada abad XVI Masehi bertujuan untuk berdagang. Pada awalnya, mereka bertempat tinggal di pelabuhan dan mendirikan benteng-benteng yang dipakai sebagai tempat tinggal dan gudang-gudang penampungan hasil bumi. Ketatnya per-saingan perdagangan antar bangsa-bangsa Eropa menyebabkan terjadinya perkembangan tujuan yang semula ber-dagang menjadi hasrat untuk menguasai dan memonopoli pengumpulan hasil bumi di Indonesia. Hasrat penguasaan dan monopoli inilah yang menyebabkan Bangsa Belanda kemudian menjadikan Indonesia sebagai daerah koloni. Seiring dengan berkembangnya kekuasaan bangsa Eropa, permukiman mereka menyebar sampai ke daerah pedalaman dan mulai mendirikan benteng-benteng pertahanan, pusat perkantoran, rumah tinggal, dan tentunya diikuti dengan prasarana ekonomi, transportasi, serta fasilitas-fasilitas penunjang kebutuhan hidup.

Persebaran permukiman Belanda yang mencapai pelosok inilah yang kemudian memerlukan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Pada mulanya alat transportasi yang digunakan masih bersifat sangat sederhana dengan kapasitas dan jarak tempuh angkut masih sangat terbatas. Alat transportasi yang dipakai pada masa tersebut adalah gerobak atau cikar (Suhartono, 1991). Setelah dikenal kereta api di Indonesia, angkutan dengan gerobak mulai tergeser. Kereta api menjadi alat transportasi yang banyak digemari, mengingat efisiensi yang ditawarkan. Selanjutnya sejarah perkeretaapian merupakan bagian dari perjalanan hidup bangsa Indonesia.

Kereta api tidak hanya digunakan untuk mengangkut hasil bumi, tetapi sekaligus untuk angkutan penumpang. Sebagai angkutan penumpang dan barang, kereta api memiliki kelas-kelas berdasarkan fasilitas yang disediakan. Fasilitas-fasilitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pemakai jasa kereta api termasuk kriteria untuk pengklasifikasian stasiun. Pengklasifikasian stasiun tentunya dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian situasi dan kondisi kebutuhan pengangkutan setempat (Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997).

Tulisan ini membahas salah satu stasiun yang merupakan bangunan stasiun peninggalan kolonial yang memiliki motif hias sangat indah dan raya yaitu Stasiun Jebres yang terletak di kota Surakarta. Saat ini Stasiun Jebres masuk dalam kategori stasiun kelas II.

Bangunan stasiun ini merupakan salah satu bangunan kolonial yang masih dikatakan utuh karena dewasa ini ada beberapa puluh bangunan

kolonial yang sudah hilang atau sengaja dihilangkan dari tempatnya dan kemudian diganti dengan bangunan yang baru. Hal seperti itu banyak terjadi terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Bandung. Oleh karena itu sering terjadi bangunan kolonial tersebut kurang terawat dan mengalami kerusakan.

Stasiun Jebres sekarang berada di lingkungan yang cukup kumuh, karena di depannya terdapat pasar tradisional. Menurut informasi dan data sejarah yang ada, tempat tersebut dahulu adalah bangunan *kerkhof* atau kompleks makam orang Eropa (de Jong, 1993). Apabila ditengok ke belakang, pada waktu stasiun tersebut baru didirikan, diperkirakan kondisi kawasan stasiun merupakan pusat perekonomian yang ramai karena dekat dengan pusat keraton. Di sekitar kawasan Jebres banyak bangunan kolonial yang masih dapat dilihat saat ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kawasan stasiun memiliki banyak daya tarik dibandingkan daerah di sekitarnya. Daya tarik tersebut terutama bangunan stasiunnya sendiri dan didukung dengan potensi bangunan-bangunan kolonial di sekitarnya.

### Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan areal penelitian adalah Stasiun Jebres dan lingkungannya. Bangunan Stasiun Jebres berada di dua kelurahan yakni Kelurahan Jebres dan Kelurahan Purwodiningratan. Sementara bangunan-bangunan yang diperkirakan merupakan bangunan kuna tersebar dalam cakupan wilayah administrasi Kecamatan Jebres yang terdiri atas 10 kelurahan yaitu Kelurahan Jebres, Sewu, Gandekan, Sudiroprajan, Kepatihan Wetan, Purwodiningratan, Jagalan, Pucangsawit, Tegalharjo, dan Mojosongo. Areal penelitian meliputi seluruh wilayah administrasi Kecamatan Jebres yang mempunyai luas kurang lebih 7 km<sup>2</sup>.

### Tinjauan Pustaka

Bangunan kolonial terdiri atas bangunan-bangunan yang difungsikan untuk melayani kepentingan-kepentingan kolonial. Variasi bangunan kolonial antara lain benteng, rumah peristirahatan, pabrik, dan stasiun. Bangunan-bangunan tersebut tidak semuanya merupakan bangunan cagar budaya. Di samping usianya, terdapat persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya:

a. mewakili masa gaya yang khas, atau percontohan gaya atau

- percontohan fungsi yang unik dari bangunan yang bersangkutan;
- b. mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
  - c. jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka.

Selanjutnya, bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya perlu dilakukan perawatan, bahkan bilamana perlu dilaksanakan pemugaran. Pemanfaatan selanjutnya memungkinkan pula suatu pengalihan fungsi sepanjang tidak menghapus data strukturalnya.

Pelestarian bangunan adalah upaya memahami peran, status, dan makna suatu bangunan dalam lingkup suatu lingkungan terbatas, yang diciptakan atau tercipta oleh sekelompok manusia yang ingin menerapkan kehidupan budayanya di dalam atau pada tempat tertentu yang juga sangat terbatas sifatnya. Pelestarian bangunan peninggalan kolonial sebenarnya bukan hanya terpancang pada bangunannya saja, melainkan lebih luas lagi hingga mencakup kawasan yang mengandung nilai sejarah.

Menurut Bagoes P. Wiryomartono (1995), beberapa butir pemikiran tentang pelestarian bangunan lama antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pelestarian bangunan-bangunan kuna di Indonesia menuntut pemikiran kembali hakikat keberadaannya di tengah kehidupan komunitas sekarang. Dengan demikian yang perlu dilestarikan bukan hanya bangunannya saja tetapi keterkaitan antara bangunan tersebut terhadap kehidupan komunitas di sekelilingnya.
2. Sejarah bangunan hingga saat ini masih merupakan suatu sumber penting bagi pelestarian bangunan-bangunan lama. Kelangsungan suatu bangunan mungkin menantang sejarah, apabila tidak mampu menjawab masalah-masalah yang muncul yang meliputi kehidupan ekonomi komunitas, kebanggaan lokalitas, dan masalah-masalah sosial setempat.
3. Sejarah bangunan memiliki bobot tersendiri untuk membangun struktur makna edukatif yaitu relevansinya dengan kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Konservasi lingkungan dan bangunan kuna tidak hanya penting dilihat dari segi sosial budaya saja, melainkan dari segi sosial ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapat dan perluasan lapangan kerja. Misalnya pemanfaatan lingkungan tradisional yang tertata baik sebagai objek wisata atau revitalisasi bangunan kuna dengan menambahkan fungsi baru yang bersifat komersial.

Nilai spesifik dari rona arsitektur kota didasari oleh karakter perilaku perubahan sosial budaya masyarakat kota merupakan hal yang dapat

dijadikan dasar sebagai landasan dalam menentukan kriteria yang spesifik untuk wilayah bersangkutan. Bangunan mempunyai peran terhadap kawasan dan dapat menjadi orientasi terhadap kawasan sekitar. Upaya pelestarian bukanlah romantisme masa lalu tetapi perlu memandang faktor ekonomi dalam mengupayakan pelestarian tersebut. Oleh karena itu, upaya pelestarian harus didukung dengan upaya pemanfaatan.

Stasiun Jebres sudah dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budaya yang keberadaannya dilindungi Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 karena stasiun ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan perjalanan sejarah Keraton Kasunanan Surakarta. Sesuai dengan nama yang disandang stasiun yakni SK atau *Solo Keraton* (de Jong, 1993).

Pelestarian Stasiun Jebres yang kepemilikannya dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia dilakukan agar pada masa selanjutnya stasiun tersebut mampu mempertahankan keaslian bentuk. Upaya pelestarian dapat dimulai dengan menggali potensi yang terkandung pada bangunan stasiun. Potensi itu terlihat selain dari segi sejarah, juga dari segi arsitektur bangunannya, terutama atap dan bangunan.

Pelestarian tidak hanya terbatas pada bangunan stasiunnya saja, tetapi juga lingkungan stasiun dan daerah sekitar yang mendukung keberadaan stasiun tersebut. Dalam Laporan Inventarisasi Bangunan dan Kawasan Kuna Bersejarah Di Surakarta (1994/1995), disebutkan bahwa Stasiun Jebres merupakan salah satu wujud bangunan kolonial yang digunakan untuk kegiatan transportasi dan merupakan satu-satunya stasiun dengan gaya arsitektur barat (*baroque*).

Stasiun Jebres tidak dapat dilihat secara sendiri, tetapi potensi kawasan sekitarnya dapat memberi tambahan apresiasi terhadap objek tersebut. Upaya pelestarian dengan mengangkat potensi kawasan sekitarnya, melalui model strategi pengelolaan, diharapkan dapat mengangkat seluruh potensi stasiun sehingga Stasiun Jebres dan kawasan di sekitarnya dapat lestari.

## Landasan Teori

Ruang (*space*) merupakan tempat berbagai kegiatan populasi yang berada di dalamnya. Berbagai kegiatan ini berinteraksi dan mengkreasi ulang ruang baik bersifat praktis maupun simbolis (Zahnd, 1999). Manusia bermukim di suatu tempat (kota) pada dasarnya adalah pengukir sejarah kotanya. Guna memenuhi tuntutan kehidupannya mereka membangun elemen-elemen kota berupa perumahan, tempat ibadah, kantor, rumah sakit, makam, dan jaringan jalan. Elemen-elemen pembentuk kota tersebut menjadi titik-titik ingatan yang dapat dijadikan

identitas suatu kota sekaligus bukti perjalanan sejarah suatu bangsa (Ardjo, 1998).

Titik-titik ingatan yang ditandai dalam wujud beragam bentuk arsitektural mampu mengungkapkan kebudayaan masyarakatnya. Material bangunan yang tersedia, kebutuhan sosial ekonomi, tradisi dan budaya penghuninya, serta lingkungan fisik yang menentukan rumah tetap bertahan. Bentuk arsitektural suatu bangunan kadang dapat menunjukkan salah satu wujud kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan lain (DeBlij, 1977).

Makna dari uraian tersebut yang mengawali individu atau komunitas untuk mengkonservasi bagian-bagian kota yang memiliki nilai penting untuk dijadikan dokumen peristiwa sejarah dan perkembangan lingkungan binaan. Artinya keberadaan bangunan kuna di suatu kawasan merupakan elemen pembentuk dan penanda kota.

Kota adalah artefak terbesar dari aspirasi budaya manusia. Struktur dan wajah kota dapat bercerita tentang kompleksitas persilangan identitas masyarakatnya. Lapis demi lapis karakter identitas yang hadir di kota haruslah dibaca sebagai keanekaragaman yang memperkaya budaya dan memperunik wajah kota (Kamil, 2002).

Upaya untuk mempertahankan bukti sejarah melalui tinggalan bangunan-bangunan kuna merupakan program pembangunan yang semakin penting. Namun demikian, masalah konservasi tampak menjadi rumit sekaligus menarik karena terjadi pro kontra dalam kegiatan pelestarian. Di satu sisi bangunan-bangunan kuna dianggap penghambat pembangunan kota, di sisi lain menjaga identitas kota melalui pelestarian bangunan-bangunan kuna mendesak dilakukan.

Masalah pelestarian bangunan kuna dan kawasannya telah menjadi isu dari perencanaan. Pada jaman kolonial Hindia Belanda telah memiliki perangkat perlindungan terhadap bangunan kuna dan lingkungannya berupa *Monumenten Ordonantie* 238 Tahun 1931. Perangkat perundang-undangan tersebut saat ini dikenal dengan nama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Selain itu, telah pula disahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung, Pasal 38 yang menyatakan bahwa bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan. Hal itu berarti kriteria suatu bangunan layak untuk dilestarikan bukan semata-mata karena nilai arsitektural, tetapi juga karena pertimbangan kesejarahan (arkeo-logis), sosio-kultural, keilmuan, politik, dan ekologis.

Tahapan awal yang perlu dilakukan dalam kegiatan pelestarian adalah proses dokumentasi bangunan untuk selanjutnya dapat diketahui karakteristik bangunan di suatu kawasan. Sudah semestinya kebijakan pembangunan kota mengakomodasi kegiatan pelestarian bangunan, khususnya bangunan kuna.

Usaha pelestarian tersebut memiliki beberapa kriteria yakni adanya estetika, tipikal, kelangkaan, peran sejarah, memperkuat suatu kawasan dan *superlative* (Catanese, 1992). Kriteria tersebut dapat diuraikan yaitu: Peninggalan arkeologis dilestarikan karena kualitas estesisnya, khususnya apabila merefleksikan periode tertentu dalam kurun waktu sejarah; Tinggalan yang umum dari masa lalu dapat dilestarikan sebagai wakil dari masa itu karena pernah terdapat dalam jumlah yang banyak, sehingga mewakili suatu tipologi bangunan; Perhitungan bahwa suatu bangunan merupakan tinggalan satu-satunya dari jenis ataupun gaya bangunan yang masih tersisa; Pelestarian bangunan atau kawasan sebagai simbol fisik dari fakta kesejarahan karena terkait dengan seorang tokoh atau peristiwa historik tertentu; Pelestarian suatu bangunan atau kawasan mempunyai dampak positif bagi pengembangan sesuai identitas budaya kawasan tersebut; Suatu bangunan dapat merupakan yang terbesar, tertinggi, pertama dan sebagainya di lingkungannya (Catanese, 1992).

## CARA PENELITIAN

Penelitian tentang penyusunan strategi pengelolaan Stasiun Jebres dan kawasannya ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, pengolahan data, pembahasan, kesimpulan, dan saran.

### Pengumpulan data

Pada awal penulisan dikumpulkan sejumlah data sekunder meliputi dokumen kebijakan pemerintah, data instansional (kelurahan dan kecamatan), peta dasar dan peta tematik, data historis (babad), dan hasil-hasil penelitian yang terkait. Sesudah data terkumpul dilanjutkan dengan survey lapangan yang meliputi peninjauan kawasan, mencatat kondisi bangunan, pemotretan, dan *plotting* bangunan-bangunan bersejarah pada peta dasar.

### Pengolahan data

Data tertulis dan data lapangan diolah dan diidentifikasi berbagai aspeknya untuk memperoleh profil Stasiun Jebres dan kawasannya. Aspek yang diuraikan meliputi seni bangunan, bangunan dan

lingkungannya, juga uraian sejarah muncul dan berkembangnya Kota Surakarta (aspek historis, sosial, ekonomi, dan budaya). Data lain hasil pengolahan data adalah peta tematik berupa peta sebaran bangunan-bangunan bersejarah di lokasi penelitian dan peta penggunaan lahan.

## Pembahasan

Dari hasil identifikasi, data dianalisis dengan pendekatan kronologi (historis). Artinya dimensi tempat (Stasiun Jebres dan sekitarnya) menjelaskan interaksi keruangan (Kecamatan Jebres), dan dimensi waktu (sejarah) menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan kawasan Jebres. Hasil analisis adalah karakteristik kawasan Jebres. Berdasarkan potensi dan kerawanan yang tampak dari kawasan tersebut kemudian disusun strategi pengelolaan dalam upaya pelestarian sumberdaya arkeologi (gambar 1).

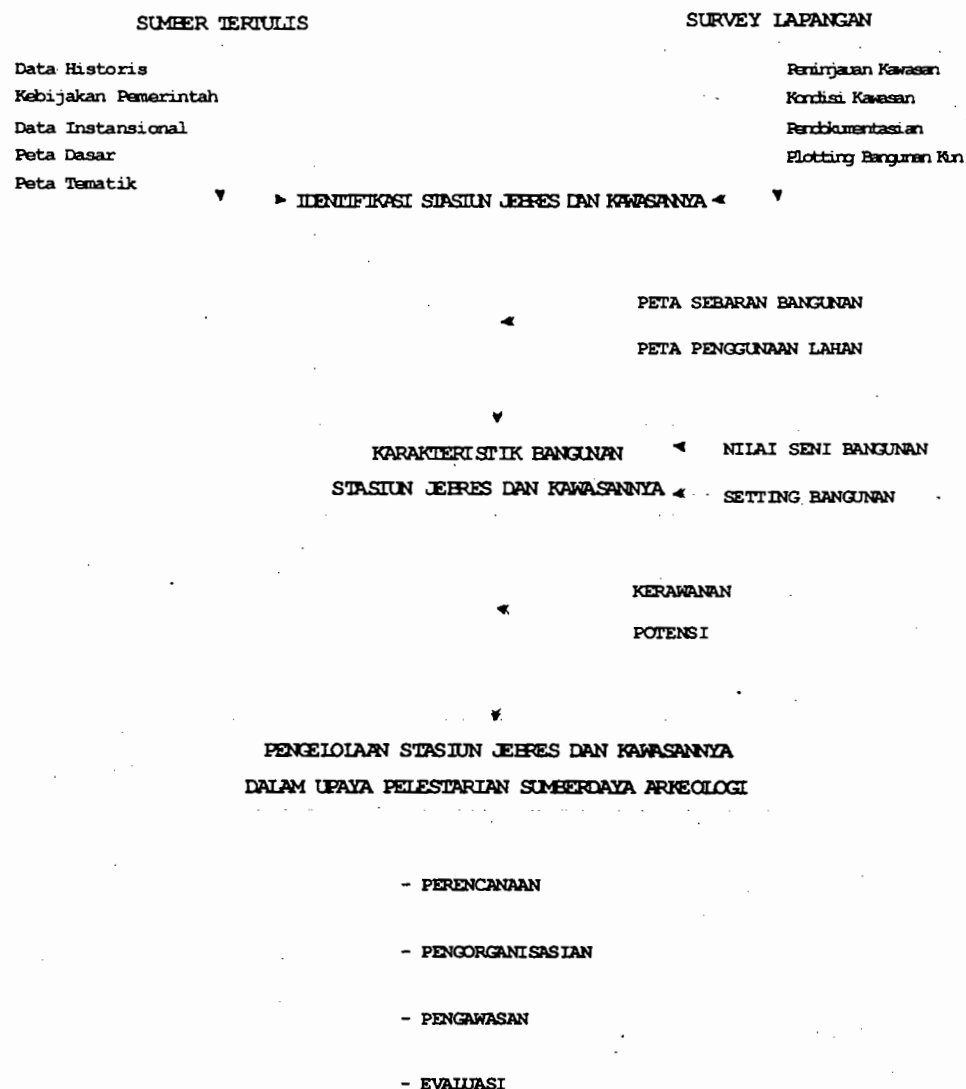
## HASIL PENELITIAN

Bangunan Stasiun Jebres merupakan bangunan berarsitektur kolonial bergaya Neo Klasik. Gaya Neo Klasik ini berkembang pada abad XVIII - XX. Ciri-ciri arsitektur bangunan kolonial terlihat dari ukuran pintu dan jendela yang tinggi serta adanya pilaster (yaitu tiang yang menempel pada dinding). Ciri bangunan kolonial bergaya Neo Klasik ditandai dengan komponen bangunan bentuk simetris, lengkungan dan garis-garis serta memiliki ruang besar, denah persegi panjang dan koridor panjang. Ciri khas yang lain adalah hiasan sulur daun pada dinding bangunan, bagian atas jendela diberi hiasan segitiga serta pintu berhias angin-angin berbentuk setengah lingkaran (lengkung).

Stasiun Jebres masuk wilayah dua kelurahan yaitu Kelurahan Jebres dan Kelurahan Purwodiningratan. Bangunan stasiun terdiri atas sebuah bangunan utama, beberapa bangunan penunjang, dan fasilitas umum. Bangunan utama terdiri atas tujuh bidang, dan tiap bidang terbagi menjadi beberapa bagian atau ruangan. Bangunan penunjang adalah Ruang Pengawas Perjalanan Kereta Api, Ramah Sinyal, Menara, Kran air, dan Gudang Peti Kemas, sedangkan bangunan fasilitas umum adalah Mushola dan Toilet. Bangunan utama dan bangunan penunjang yang merupakan bangunan lama, masuk wilayah Kelurahan Purwodiningratan sedangkan mushola dan toilet yang merupakan bangunan baru, masuk wilayah Kelurahan Jebres.



## BAGAN ALIR PENELITIAN



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

Bangunan Stasiun Jebres berada di Kecamatan Jebres. Berdasarkan penelitian kawasan ini merupakan kawasan budaya, karena masih banyak ditemukan toponim dan bangunan kuna yang mencirikan ruang kota kuna Surakarta. Toponim yang saat ini masih dapat ditelusuri adalah toponim Kepatihan Wetan, Jebres, Jagalan, Purwodiningratan, dan Trunosutan. Bangunan kuna yang terdapat di kawasan ini berjumlah 99 bangunan terdiri atas 44 bangunan rumah tinggal, 37 bangunan rumah toko dan pasar, 4 bangunan fasilitas keagamaan, 9 bangunan fasilitas publik, dan 5 bangunan sekolah.

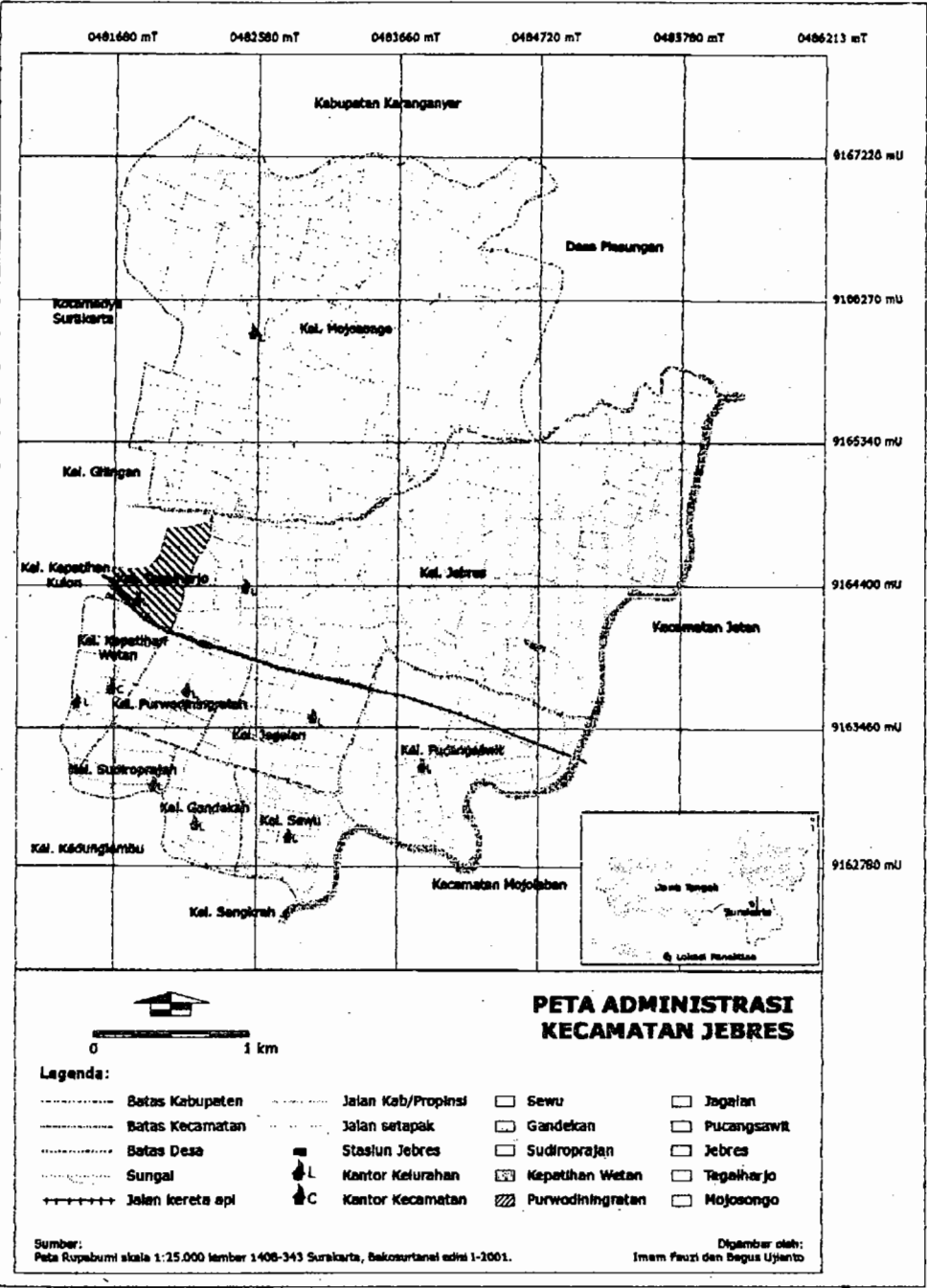
Bangunan-bangunan tersebut letaknya tersebar di enam Kelurahan yaitu 6 bangunan terletak di Kelurahan Jebres, 6 bangunan di Kelurahan Gandekan, 36 bangunan di Kelurahan Sudiroprajan, 21 di Kelurahan Kepatihan Wetan, 2 bangunan di Kelurahan Jagalan, 23 bangunan di Kelurahan Purwodiningratan, dan 5 bangunan di Kelurahan Tegalharjo. Tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Sewu, Pucangsawit, dan Mojosongo tidak ditemukan bangunan kuna.

Ditinjau dari persebarannya, sebagian besar bangunan-bangunan kuna berada di dekat pusat perekonomian yakni Pasar *Gede Hardjanagara* yang berada di Kelurahan Sudiroprajan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa daerah tersebut merupakan toponim Pecinan.

Stasiun Jebres beserta bangunan-bangunan kuna di sekitarnya merupakan peninggalan arkeologis yang mempunyai estetika, tipikal, kelangkaan, dan sejarah yang dapat memperkuat kawasan tersebut. Sedangkan kawasan budayanya merupakan bagian dari ruang kota kuna Surakarta yang mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi sering tidak sesuai dengan karakternya sebagai kawasan budaya sehingga dapat merusak identitas budaya di kawasan tersebut. Untuk itu diperlukan strategi untuk melestarikan bangunan stasiun dan kawasan budayanya.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan rencana pelestarian, perlu diterapkan empat komponen pengelolaan program pelestarian bangunan stasiun dan kawasannya. Empat strategi pengelolaan tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengevaluasian.

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu (Kunarjo, 2003). Seperangkat keputusan tersebut dirumuskan dalam beberapa tahap dalam perencanaannya.



1. Melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di kawasan budaya Jebres.

2. Menetapkan visi, misi, dan tujuan umum Pelestarian Kawasan Jebres.

Visi: Menampilkan Kawasan Budaya Jebres untuk melengkapi citra Kota Surakarta sebagai Kota Bersejarah.

Misi: Menjaga Kawasan Budaya Jebres dari perubahan yang mengancam kerusakan bangunan dan kawasannya.

Tujuan Umum: Mengelola dan memelihara peninggalan-peninggalan purbakala beserta situs-situsnya dengan berbagai cara agar dapat dimanfaatkan lebih lama dan tetap mempertahankan nilai kulturalnya.

3. Mengefektifkan kebijakan yang sudah ada dan menyusun strategi agar berbagai kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Menetapkan sasaran yang diperlukan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

5. Menyusun struktur organisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai penggerak kegiatan perencanaan.

Pengorganisasian yang baik memerlukan kerjasama di antara *stakeholders* (pihak-pihak yang terkait dan penentu kebijakan). Pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian Kawasan Budaya Jebres adalah lembaga yang dapat mengakomodasi dan mengkoordinasi kepentingan antara berbagai pihak. Kelembagaan tersebut dapat dikelompokkan:

1. Kelembagaan formal yaitu berbagai lembaga instansi terkait baik di tingkat Internasional, Nasional maupun daerah.

2. Kelembagaan Non formal yaitu berbagai elemen masyarakat yang peduli dengan keberadaan dan kelestarian kawasan budaya Jebres.

Pengawasan perlu dilakukan meskipun telah ada sistem pengorganisasian yang berusaha untuk menyelamatkan bangunan beserta kawasan bersejarahnya. Cara pelaksanaan pengawasan dapat secara langsung tetapi dapat pula dilakukan melalui pengkajian berbagai laporan yang masuk ke bidang kelembagaan. Pada prinsipnya kegiatan pengawasan adalah mengidentifikasi masalah yang muncul dan mencatat sekaligus memberi alternatif solusinya.

Pengevaluasian mutlak diperlukan, karena pelestarian harus berkelanjutan. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang telah direncanakan sudah berjalan dengan tepat. Tujuan dilakukannya evaluasi (Kunarjo, 2002) yang terkait dengan program pelestarian.

1. Mempertanggungjawabkan keberhasilan program pelestarian kepada masyarakat atau instansi yang membiayai.
2. Keberhasilan maupun ketidakberhasilan program ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak kelembagaan terkait.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa cakupan kegiatan evaluasi meliputi.

1. Mengevaluasi kegiatan pelestarian yang telah dikerjakan.
2. Mengevaluasi program pelestarian secara keseluruhan untuk tujuan pengambilan keputusan.
3. Menyiapkan laporan untuk keperluan pengambilan keputusan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardjo, Wisnu Murti, 1998, "Menyelamatkan Masa Lalu Kota-kota Kita untuk Masa Depan", *Majalah Arsitektur Sketsa*, 14/09/98, Jakarta.
- Budihardjo, Eko, 1997, "Pelestarian dan Pemanfaatan Bangunan Indis", dalam *Diskusi Ilmiah Arkeologi VIII, Pelestarian dan Pemanfaatan Bangunan Indis*, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Yogyakarta.
- Catanese, Anthony J., dan James C. Snyder, 1992, *Perencanaan Kota*, Terjemahan oleh Ir. Wahyudi dan Tim Penerbit Erlangga, Erlangga, Jakarta.
- DeBlij, Harm, 1977, *Human Geography, Culture, Society and Space*, John Wiley, Sons Inc, New York.
- de Jong, Michiel van Ballegorjen, 1993, *Spoorwegstations op Java*, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam.
- Kamil, M. Ridwan, 2002, "Wajah Kota dalam Politik Identitas", *Artikel Kompas*, Jakarta.
- Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1994/1995, *Inventarisasi Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Laporan Interim*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tk. II Surakarta.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan, 1995, *Looking After Heritages Places, Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners, and Administrators*, Melbourne University Press, Melbourne.
- Rajiman, 1986, *Sejarah Surakarta, Tinjauan Sejarah Politik dan Sosial*, Krida, Surakarta.
- Rozendaal, Jack, 2000, *Steam and Rail in Indonesia*, Warwickshire, Paul Catchpole Ltd., England.
- Sidharta dan Eko Budihardjo, 1989, *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Subarkah, Iman, 1981, *Jalan Kereta Api*, Penerbit Idea Dharma, Bandung.
- Suhartono, 1991, *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta. 1830 - 1920*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

- Sumarlina, Nunik Sri, 1993, "Pola Tata Kota Surakarta Awal dan Perkembangannya", *Skripsi Sarjana* Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997, *Sejarah Perkeretaapian Indonesia jilid 1*, APKA dan CV. Angkasa, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997a, *Sejarah Perkeretaapian Indonesia jilid 2*, APKA dan CV. Angkasa, Bandung.
- Undang-undang RI No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Wiryomartono, Bagoes P., 1995, *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zahnd, Markus, 1999, *Perancangan Kota Secara Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*, Edisi Ke-5, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.